

RINGKASAN PENELITIAN
DOSEN MUDA



ANALISIS POTENSI DAN PERTUMBUHAN
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI SOLO, JAWA TENGAH
ANTARA SEBELUM DAN SETELAH ERA OTONOMI DAERAH

Oleh:

Yuli Tri Cahyono, SE, MM, Akt

Fauzan, SE, MSi, Akt

DIBIYAI PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN DENGAN
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR: 019/O06.2/PP/KT/2009
DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
OKTOBER 2009

ANALISIS POTENSI DAN PERTUMBUHAN
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DI SOLO, JAWA TENGAH
ANTARA SEBELUM DAN SETELAH ERA OTONOMI DAERAH

Oleh:

Yuli Tri Cahyono dan Fauzan

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Studi mengenai etika pajak dan norma-norma sosial merupakan salah satu jenis motivasi yang mampu meningkatkan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan bukan semata-mata hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, hasil riset menunjukkan bahwa etika pajak dan norma-norma sosial mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak dan studi ini telah memberikan bukti bahwa peran etika individu dan norma-norma sosial dalam diri Wajib Pajak mempengaruhi mereka untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak (Wenzel, 2004). Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan, etika Wajib Pajak terhadap perpajakan dan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemberlakuan UU 22 dan 25 tahun 1999 pada tahun 2001 berdampak besar terhadap wewenang dan tanggungjawab serta kondisi keuangan daerah. Solo merupakan salah satu daerah yang memperoleh peningkatan pendapatan sejak diberlakukannya UU ini. Untuk itu perlu dicari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang potensial untuk digali sebagai sumber pendapatan andalan dan pengalokasian dana yang tepat dalam pemanfaatan kelebihan fiskal sekarang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan dan membangun sektor-sektor yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah nantinya.

Kondisi keuangan daerah dapat dilihat dari sisi kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Selisih dari Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal merupakan celah fiskal yang harus dapat ditutupi untuk bisa melaksanakan standar pelayanan publik. Perhitungan Kebutuhan dan

Kapasitas dilakukan dengan memakai formula untuk menghitung DAU (PP 84 tahun 2001). Pemkot Solo perlu mengalokasikan dana pembangunan di saat masih memiliki kelebihan kapasitas fiskal pada pemecahan berbagai permasalahan pembangunan dan pembangunan sektor-sektor yang nantinya dapat menjadi sumber pendapatan untuk bisa mempertahankan kapasitas fiskal. Dari analisis juga diperoleh beberapa sumber pajak dan retribusi yang potensial untuk dikembangkan dan sumber-sumber pajak yang belum tergali dengan optimal.

SUMMARY

Study about tax ethics and social norm is one of several kinds of motivation which able to increase the fulfillment of Tax Payer obligation and it is not merely just executing what becoming its obligation. The result of the research shows that tax ethics and social norms influence the tax obligation fulfillment. This study already gives proof that the individual ethics and social norms of Tax Payer will influence their in fulfilling their obligation in paying tax (Wenzel, 2004). Obedience level of the society is the form of high consciousness of the society to the law and the level of Tax Payer obedience is influenced by their understanding level about tax regulation, the ethics of Tax Payer concerning with tax and consciousness from the Tax Payer it self in fulfilling their tax obligation.

The legitimate of the UU No 22 and 25 Year 1999 in 2001 has great influenced to the authorization and the trustworthy also to the financial condition of a district. Solo regency is one of counties that received an increasing income since this regulation is justifiable. In this case, the sources of the other potential income districts must be located to be a promise income and the exceptional distribution fund is used to employ the effective exceed fiscal in handling construction and building up another region that can be develop as another income districts.

The financial condition of a district can be seen from the necessity and capacity fiscal of the district. The discrepancy of necessity and capacity of fiscal can be avoided and it can be shifted for standard public aid. A calculation of the necessity and capacity can be done using formula to compute the public allocation fund "Dana Alokasi Umum" (PP No. 84 Year 2001). The government of Solo county need to allocate construction fund because there are abundantly fiscal capacity for solving construction problem at this time and other part of constructions that can become an income sources to maintain the fiscal capacity. The analysis result is also obtained that the tax sources and the potential retribution that can be developed need to be done optimally.